

Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Author

Muhammad Alkamah¹, Bahar Sinring², Dahlia Baharuddin^{3*}

Email

muhammadalkamah@gmail.com

bahar.sinring@umi.ac.id,

dahlia.baharuddin@umi.ac.id

Afiliasi

¹Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

^{2,3*}Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan. Hipotesis penelitian menggunakan basis teori/konsep, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi data panel berbantuan SPSS for Statistic 25 untuk analisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. bahwa Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan.

Kata kunci: PDRB, Pendidikan Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan

Pendahuluan

Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan salah satu masalah yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat. Fenomena tentang kemiskinan yang ada di Indonesia hampir diseluruh pelosok, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Kemiskinan adalah salah satu indikator rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar tingkat kesejahteraan dan juga kemiskinan dalam suatu masyarakat bisa diatasi.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu: pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat dari perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah menandakan produktivitas yang rendah pula. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia diakibatkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan sebagai masalah nasional, tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah

kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi (Soebagiyo, 2016).

Penduduk miskin yang memiliki permasalahan yang lebih kompleks tentang kemiskinan adalah penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Kehidupan kota yang diwarnai dengan materialisme dan individualisme, menyebabkan penduduk miskin di perkotaan sangat kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mereka mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk memperoleh makanan dengan melakukan berbagai aktivitas yang memberikan imbalan ekonomi. Jenis-jenis pekerjaan seperti penarik becak, pedagang asongan jalanan, penjual makanan keliling, penjaja mainan anak-anak, pemulung, tukang cukur jalanan dan buruh lepas; merupakan jenis-jenis aktivitas ekonomi yang banyak ditekuni penduduk miskin di perkotaan. Jenis-jenis aktivitas ekonomi tersebut tentu masih jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal. Indonesia sebagai bagian dari negara dunia ketiga, dalam proses pembangunannya belum pernah bebas dari persoalan kemiskinan. Walaupun secara moral dan konstitusional, bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat agar masyarakat Indonesia dapat hidup layak dari sudut ekonomi, sosial dan politik, sesuai dengan sila kelima dari Pancasila dan Pasal 34 UUD Republik Indonesia. Namun, sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai saat ini, pembangunan Indonesia masih selalu diwarnai oleh persoalan dan problematika kemiskinan yang semakin krusial (Kasim, 2006). Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia periode Maret 2015 adalah 28,59 juta jiwa (11,22 %) di perkotaan maupun pedesaan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin periode September 2014, angka penduduk miskin adalah 27,73 juta jiwa, jadi angka kemiskinan pada Maret 2015 terjadi kenaikan sebanyak 0,86 ribu jiwa.

Berbagai program pun telah dirancang oleh para pemangku kepentingan (stake holder) untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia dari rezim ke rezim program pengentasan kemiskinan juga sudah diberikan seperti pemberian dana IDT (Inpres Desa Tertinggal), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Pemberian Rumah Miskin untuk RTM (Rumah Tangga Miskin), KUR (Kredit Usaha Rakyat), penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi program bantuan kemiskinan yang ditujukan untuk keluarga miskin guna menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi masalah yang penting di Indonesia dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia dan terkhusus untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2019

Tahun	Jumlah Kemiskinan (Ribu Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)
2010	917,40	11,40
2011	835,51	10,27
2012	805,90	9,82
2013	863,20	10,32
2014	806,35	9,54
2015	797,70	9,39
2016	807,03	9,40
2017	813,07	9,38
2018	792,64	9,06
2019	767,80	8,69

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2020)

Pada dasarnya problematika kemiskinan ialah permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan cara berkesinambungan, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat

dan dilaksanakannya secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada Tabel 1 di atas persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari tahun ketahun, tingkat kemiskinan pada tahun 2010 yang tertinggi yakni sebesar 11,40% dan yang terendah pada tahun 2019 yakni 8,69%. Penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dinilai sangat menghambat kinerja ekonomi suatu daerah sedangkan bila kinerja ekonomi mengalami tren yang positif, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan indikasi berkurangnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini bisa ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi pendidikan, tenaga kerja, kesehatan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

Ini merupakan satu tantangan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengupayakan pembangunan untuk tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen pemerintah untuk menaggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun sejalan dengan kebijakan pemerintah dan komitmen untuk menurunkan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari pembangunan dibidang ekonomi disamping bidang-bidang yang lainnya seperti, sosial, budaya, politik dan keamanan. Khususnya dibidang ekonomi, nilai tambah yang dihasilkan oleh bidang ekonomi secara tidak langsung menggambarkan tingkat pembangunan yang dicapai pada suatu daerah. Bagi Provinsi Sulawesi Selatan hal ini sangatlah perlu agar menjadi acuan untuk pembangunan berikutnya yang lebih baik. Sejalan dengan hal itu berbagai pembangunan diarahkan khususnya pada daerah yang berpenduduk padat dan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010).

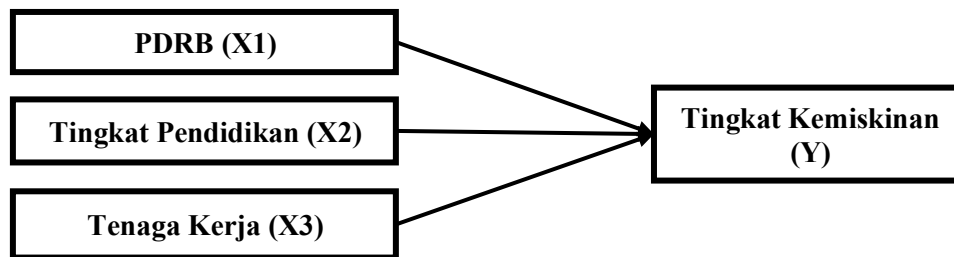
Pertumbuhan PDRB yang pesat tidak secara otomatis berdampak terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di suatu daerah. Sementara pada tahun 1960-an, pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu diringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan. Dalam program pembangunan pengentasan kemiskinan, selalu ada proses komunikasi ekonomi harus berfokus untuk mengurangi mekanisme yang membuat keluarga, daerah dan bahkan Negara secara keseluruhan terus berada dalam perangkap kemiskinan yakni ketika kemiskinan di masa lalu menyebabkan kemiskinan di masa depan dan menghasilkan strategi paling efektif untuk melepaskan diri dari perangkap itu (Todaro, 2011).

Selanjutnya Tenaga kerja merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Todaro (2011) investasi dalam pembinaan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan tingginya jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan menjadi meningkat apabila tidak didukung dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai

bagi penduduk usia kerja. Apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak akan diikuti dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, maka akan berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori Human capital dijelaskan bahwa penting meningkatkan sumber daya manusia dengan peningkatan pendidikan dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka produktivitas penduduk akan meningkat yang berakibat pada kesejahteraan penduduk.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Sustainable Development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Pendidikan berperan penting dalam kesejahteraan seseorang dengan berbagai cara yang berbeda. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan informasi, memperdalam pemahaman akan perekonomian, memperluas produktivitas, dan memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen atau warga negara. Selain itu pendidikan dan distribusi pendapatan adalah mempunyai kolerasi yang positif dengan penghasilannya selama hidup seseorang.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2) Pendapatan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan, 3)

Pendapatan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapat gambaran tentang pengaruh PDRB, Pendidikan dan Tenaga Kerja yang terkait terhadap Tingkat Kemiskinan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan diolah dengan metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai metode utama penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atau informasi dalam bentuk tertulis mengenai PDRB, Pendidikan dan Tenaga Kerja dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Data kuantitatif, yaitu untuk mengetahui perkembangan PDRB, Tingkat Pendidikan (Lama Sekolah) dan Tenaga Kerja dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen, terbitan atau publikasi khusus dari instansi terkait terutama pada Kota Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2016). Data penelitian ini diperoleh

dalam bentuk data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan untuk mendukung dan memperkuat penelitian, metode dokumentasi didukung oleh sumber informasi melalui penelaahan studi pustaka, dan berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah, dan dokumen. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS version 25. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data time-series. model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Hasil dan Pembahasan

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dengan bantuan SPSS dengan menggunakan uji kolmogorof-smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Kolmogorov-Smirnov

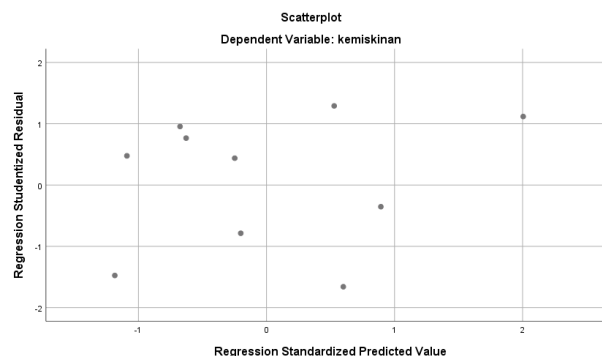
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,01932889
Most Extreme Differences	Absolute	,249
	Positive	,152
	Negative	-,249
Test Statistic		,249
Asymp. Sig. (2-tailed)		,080 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: output SPSS (2021)

Pada Tabel 2 uji normalitas memiliki nilai signifikansi 0,080 yaitu Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Data dalam penelitian ini memiliki variasi yang sama, maka data layak digunakan.

Selanjutnya Uji Heterokedestisitas, untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram Scatterplot). Jika: 1. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas. 2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.



Gambar 2. Diagram Scatterplot

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Gambar 4, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Selanjutnya dilakukan Uji Multikolinieritas, uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yakni dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF). VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi tersebut

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF
PDRB	9,027
Pendidikan	9,397
Tenaga Kerja	8,295

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas dalam model regresi.

Selanjutnya Berdasarkan pengolahan data analisa regresi linear Berganda dengan bantuan program SPSS 25, diperoleh hasil seperti dimuat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Model Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11,951	5,053		2,365	,056		
1 PDRB	-,339	,098	-1,074	-3,465	,013	,111	9,027
Lama sekolah	,879	,580	,479	1,515	,180	,106	9,397
tenaga kerja	-,482	,406	-,353	-1,188	,280	,121	8,295

a. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4 maka diperoleh persamaan model regresi antara variabel independen PDRB, Lama Sekolah, Tenaga Kerja terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (Y) sebagai berikut:

$$Y = 11,951 - 0,339X_1 + 0,879X_2 - 0,482X_3$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa Konstanta sebesar 11,951 mengindikasikan bahwa secara umum apabila Variabel dependen PDRB (X1), Lama Sekolah (X2), dan Tenaga Kerja (X3) terhadap variabel dependen yaitu bernilai konstan (tidak berubah) maka Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 11,951 persen, Koefisien PDRB (X1) sebesar - 0,339 mengindikasikan bahwa PDRB (X1) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan PDRB (X1) sebesar 1 persen maka akan menurunkan Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar - 0,339 persen, Koefisien Lama Sekolah (X2) sebesar 0,879 mengindikasikan bahwa Lama Sekolah (X2) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan Lama Sekolah (X2), sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 0,879 persen, Koefisien Tenaga Kerja (X3) sebesar - 0,482 mengindikasikan bahwa Tenaga Kerja (X3) berpengaruh negatif terhadap

Tingkat Kemiskinan (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan Tenaga Kerja (X3) sebesar 1 persen maka akan menurunkan Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar – 0,482 persen.

Selanjutnya Uji statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas t-statistic. Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh dependen PDRB (X1), Lama Sekolah (X2), dan Tenaga Kerja (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Jika nilai probabilitas t-statistic lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ atau 5% maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 5. Uji Parsial

Model	t	Sig.
(Constant)	2,365	,056
PDRB	-3,465	,013
Lama sekolah	1,515	,180
tenaga kerja	-1,188	,280

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai t-hitung PDRB (X1) sebesar -3,465 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih besar kecil dari taraf signifikansi 0.05 menyebabkan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB (X1) signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y), nilai t-hitung Lama Sekolah (X2) sebesar 1,515 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,180 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 menyebabkan H_2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lama Sekolah (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y), nilai t-hitung Tenaga Kerja (X3) sebesar -1,188 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,280 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 menyebabkan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja (X3) berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

Selanjutnya Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,968 ^a	,936	,904	,02367

a. Predictors: (Constant), tenaga kerja, PDRB, Lama sekolah

b. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 9 di atas besarnya nilai R-square adalah 0,936. Hal ini menunjukkan Tingkat Kemiskinan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel PDRB (X1), Lama Sekolah (X2), dan Tenaga Kerja (X3) sebesar 97,0%. Sedangkan sisanya 3,0% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian seperti Investasi, Teknologi, dan Sumber Daya Alam.

Selanjutnya Uji Simultan, Uji Simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Uji F mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	42,156	5	8,431	598,649	,000 ^b
	Residual	1,296	92	,014		
	Total	43,452	97			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa dari uji F test nilai F hitung sebesar 598,649 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh PDRB (X1), Lama Sekolah (X2), dan Tenaga Kerja (X3) secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

Pembahasan

PDRB Terhadap Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan PDRB merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai dengan 2019.

PDRB dapat menjadi indikator sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang. Sulawesi Selatan sendiri menunjukkan perkembangan perekonomian yang baik, hal ini dapat di lihat pada setiap tahunnya pertumbuhan PDRB mengarah ke perkemabangan yang positif sedangkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Mengalami tren penurunan. Menurut Kuznet (Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Manangkalangi, Masinambow dan Tumilaar (2020), Hasil penelitian menemukan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian yang lakukan oleh Setiawati (2017) Hasil penelitian menemukan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang.

Tingkat Pendidikan (Lama Sekolah) Terhadap Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel tingkat Pendidikan (Lama Sekolah) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan Tingkat Pendidikan (Lama Sekolah) bukan merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai dengan 2019.

Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ditemukan tidak adanya pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan menandakan bahwa meningkatnya rata-rata lama sekolah kurang berdampak bagi tingkat produktivitas. Alasan bahwa variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan salah satunya adalah capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan masih belum menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2010-2019 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tertinggal mencapai 7 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Angka tersebut masih belum mencapai target pendidikan maksimal 12 tahun atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah diusulkan United National Development Program (UNDP).

Berdasarkan pengamatan hanya beberapa Kabupaten/Kota yang rata-rata lama sekolah mencapai 11 tahun. Artinya, perlu peran pemerintah dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun, baik dari kualitas guru dan infrastruktur pendidikan yang memadai di Provinsi Sulawesi Selatan. Lama sekolah tidak lagi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan melainkan diakibatkan oleh kualitas pendidikan yang rendah. Banyaknya sarjana yang menganggur diakibatkan oleh tidak adanya kualitas SDM atau tidak adanya daya saing dalam mencari kerja. Dengan pendidikan yang tinggi, spesifikasi kerja yang sesuai juga susah di dapat di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal ini mengindikasikan bahwa lama sekolah tidak lagi mempengaruhi kemiskinan dan semakin meningkatkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Teori modal manusia (Human Capital) Adam Smith dikutip dari Randy dan Rianti (2010) berpendapat bahwa, manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan yang pendidikannya lebih rendah. upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan meningkatkan ekonominya.

Hal ini sejalan dengan Azizah, Sudarti dan Kusuma (2018), Hasil penelitian menemukan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016. Berbeda dengan penelitian Setiawati (2017) Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang.

Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan Tenaga Kerja merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai dengan 2019.

Tenaga kerja termasuk dalam salah satu sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Terserapnya tenaga kerja, akan meningkatkan kesejahteraan dikarenakan dengan bekerja maka seseorang akan mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap akan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang siap untuk bekerja, sehingga tenaga kerja yang terserap tidak seimbang dengan angkatan kerja yang siap kerja dan kemudian akan berdampak pada kemiskinan. Selain itu tidak signifikannya tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan karna tingkat keterampilan dan produktivitas pekerja yang masih di bawah standar dengan banyaknya tenaga kerja yang ada membuat tingkat upah tenaga kerja berada dibawah angka garis kemiskinan sehingga walaupun perusahaan banyak menyerap tenaga kerja agar mengurangi pengangguran, namun upah yang diberikan belum mencukupi kebutuhan masyarakat dalam kata lain dapat meingkatkan angka kemiskinan. Sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi tenaga kerja agar dapat menaikkan upah tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang baik sehingga upah yang diterima mencukupi kebutuhan hidup pekerja (upah berada diatas garis kemiskinan). Jadi, dengan pengurangan tenaga kerja dapat meningkatkan upah tenaga kerja yang memiliki potensi dan keterampilan yang baik, dan mendorong untuk terciptanya produktivitas yang lebih baik sehingga dengan upah yang lebih tinggi tersebut pekerja dapat memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak sehingga angka kemiskinan menurun. Menurut Sharp dalam Kuncoro (2000), penyebab kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang

pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2017), Hasil penelitian menemukan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang. Berbeda dengan hasil penelitian Prasetyawan, Hanim, dan Yuliati (2017) menemukan hasil tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan dalam penelitian ini adalah 1) PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan PDRB merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai dengan 2019, 2) Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan Pendidikan bukan merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai dengan 2019 dan, 3) Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan Tenaga Kerja merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai dengan 2019

Referensi

- Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. 2018. Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 167-180.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Sulawesi Selatan Dalam Angka 2020.
- Kasim, Muslim. (2006). Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya (Studi Kasus di Kabupaten Padang Mariaman. Jakarta: Indomedia.
- Manangkalangi, L. K., Masinambow, V. A., & Tumilaar, R. L. (2020). Analisis Pengaruh Pdrb Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Prasetyawan, D. T., Hanim, A., & Yuliati, L. 2017. Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, 1(1), 45-50.
- Randy R. W., Riant, N. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia (sebuah pengantar dan panduan). Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Setiawan, H. 2014., Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga Kerja, Dan Infrastruktur Terhadap penanaman Modal Asing Di Provinsi DKI Jakarta, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setiawati, I. 2017. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan Dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Soebagiyo, D. 2016. Perekonomian Indonesia. Sukoharjo: CV. Jasmine.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suryono, A. 2010. Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan. Universitas Brawijaya Press.
- Todaro, P. M. 2011. "Pembangunan Ekonomi". Jakarta: Erlangga.